



Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Lamtiur Lidia Gultom

Universitas Negeri Medan

lamtiur.gultom11@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

7 Desember 2023

Disetujui :

16 Desember 2023

Dipublikasikan :

25 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sampel penelitian ini adalah 2 diantara Pejabat/Aparatur Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pejabat Penatausahaan Keuangan yang terdiri sebanyak 98 orang (Kabupaten Dairi sebanyak 52 orang dan Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 46 orang) sebagai sampel dalam penelitian ini. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh melalui alat pengumpul data berupa kuesioner yang diedarkan secara online ataupun offline. Teknik analisis data disesuaikan dengan metode statistik yang disediakan agar pertanyaan penelitian dapat terjawab. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis statistik deskriptif dan analisis Statistik PLS-SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas; *Value for money*; Kejujuran; Transparansi; Pengawasan; Pengelolaan keuangan daerah.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of regional financial accountability, value for money, honesty, transparency and supervision on regional financial management. The sample of this research was 2 of the Officials/Apparatuses of Budget Users, Budget User Authorities, Technical Implementation Officers for Activities and Financial Administration Officers consisting of 98 people (52 Dairi Regency and 46 Pakpak Bharat Regency) as samples in this study. The type of data used in this research is primary data. Primary data collection techniques obtained through data collection tools in the form of questionnaires which are distributed online or offline. Data analysis techniques are adapted to the statistical methods provided so that research questions can be answered. The data analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis and PLS-SEM statistical analysis. The results of this study indicate accountability, value for money, honesty, transparency and supervision have a positive and significant effect on Regional Financial Management.

Keywords: *Accountability; Value for money; Honesty; Transparency; Oversight; Financial management*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Berdasarkan aturan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam pelaksanaan kewenangannya, Pemerintah kabupaten/kota berjalan diatas kebijakan, standar, norma, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan agar pembangunan tetap terjaga yaitu Pembangunan Nasional. Selanjutnya, didalam menjalankan roda pembangunan di daerah tersebut, dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu kepada tiga fungsi pemerintahan daerah yaitu sebagai berikut; melakukan tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas pelayanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi diatas, berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu pemerintah Daerah berkewajiban memberikan

pertanggungjawaban dalam bentuk laporan yang menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, dalam hal ini adalah masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan sistem pengelolaan keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar potensi terjadinya kecurangan-kecurangan dan penyimpangan semakin kecil serta adanya kejelasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan (Yassir dkk, 2022). Pengelolaan keuangan yang baik harus memiliki ukuran standar pengelolaan dan standar ketercapaian sasaran target pembangunan dan inilah yang lazim disebut dengan istilah *good governance*. Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan (Siti Maryam, 2017).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi topik sorotan di tengah masyarakat. Dewasa ini masyarakat memiliki harapan agar pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel. Masyarakat tidak menginginkan tindakan korupsi terjadi di dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan tindakan korupsi akan merugikan keuangan negara yang memberikan dampak terhambatnya pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. (Octavio, 2022). Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap mekanisme pengelolaan keuangan jika terdapat kejujuran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara yang berlaku (Natision, A., et al, 2022) dan Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan andal jika disajikan secara jujur. (Hasiara, L. O., & Sumba, I. B. P. 2020). Pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadikan masyarakat sejahtera. Dengan semakin besarnya tuntutan terhadap pengelolaan keuangan yang tepat maka pemerintah perlu menerapkan prinsip transparan dan akuntabel agar tindakan korupsi dapat diminimalisir (Zeyn, 2011). Tetapi beda halnya dengan beberapa kabupaten seperti contoh yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru yang menunjukkan kinerja pemerintah yang belum akuntabel dan transparan serta pengendalian internal yang masih lemah terlihat dari kasus Bupati pertama yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan uang daerah sebesar Rp. 42,5 miliar untuk penggunaan pribadi (Sumber: <https://news.detik.com>, diakses 03 April 2021).

Selain kasus pada Kabupaten Kepulauan Aru pada saat Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi Covid-19 terjadi beberapa kasus korupsi. salah satunya mantan menteri sosial ditangkap karna dugaan korupsi Dari kasus tersebut dapat diamati bahwa apabila tidak adanya transparansi dan akuntabilitas mungkin saja kasus tersebut tidak dapat diungkap. Pemerintah perlu meningkatkan prinsip transparan dan akuntabel pada pemerintah pusat maupun daerah dengan tujuan meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana korupsi yang sama (Iqbal, 2021). Adanya fenomena pengaduan dan pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik, baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti pengaduan terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang kurang transparan, sikap petugas atau pegawai yang kurang tanggap. Salah satu gambaran keliru yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia adalah kurangnya profesionalisme aparatur dalam organisasi pelayanan (Saida S & Mustari S, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa semakin baik nilai akuntabilitas yang diterapkan maka semakin baik pula pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian berpengaruh positif akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah (Natision, A., et al, 2022); (Yassir dkk, 2022); (Permata dkk, 2022); (Saida Said & Mustari S, 2021); (Afriza, 2021); (Octavio M, 2022). Sementara itu, penelitian terdahulu lainnya menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dimana (Agbotogun, 2019) tingkat pemerintahan di Nigeria sangat buruk karena berbagai skandal keuangan dan penyalahgunaan dana publik yang dialami negara tersebut selama bertahun-tahun. Dan menurut penelitian bahwa Akuntabilitas Keuangan Daerah mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Hasugian, F.T.,

dkk, 2021). Karena ketidak adanya pengaruh signifikan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal diantaranya belum adanya program peningkatan pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Belum maksimalnya pemanfaatan suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara konsisten sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku serta pengeluaran keuangan daerah yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai (Suparno, 2012).

Value for Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for Money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif (kemenkeu.go.id). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Permata dkk, 2022); (Saida Said & Mustari S, 2021); (Hasugian, F.T., dkk, 2021). Adapun penelitian terdahulu lainnya menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh Value for Money terhadap pengelolaan keuangan dimana sektor publik belum mengimplementasikan prinsip Value for Money (Afriza, 2021). Kejujuran (fairness) yang merupakan bagian dari tujuan good governance sudah dilaksanakan dengan baik (Suparno, 2012) tetapi belum mampu berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu, penelitian terdahulu lainnya menunjukkan hasil yang kejujuran telah mampu berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Hasugian, F.T., dkk, 2021). Semakin baik transparansi keuangan maka akan secara nyata dapat meningkatkan pengelolaan keuangan. semakin tinggi pengaruh transparansi pengelolaan keuangan maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah Faktor transparansi pengelolaan keuangan pada kantor pemerintah daerah sudah terlaksana dengan baik (Yassir dkk, 2022); (Saida Said & Mustari S, 2021); (Hasugian, F.T., dkk, 2021); (Rotisulu et al, 2021)

Bahwa tidak transparansinya pengelolaan APBD dapat menyebabkan tidak tercapainya pelayanan publik yang tidak baik. Artinya pengelolaan APBD dilakukan dengan boros, tidak adil, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak merata (Siregar, L 2011). Dalam pencapaian pengelolaan yang baik penting dilakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017). Berdasarkan penelitian yang sebelumnya sejalan dengan (Yassir dkk, 2022); (Hasugian, F.T., dkk, 2021); (Afriza, 2021); (Rotisulu et al, 2021). Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka banyak hal yang harus diperhatikan, maka penulis berminat untuk melakukan analisis terhadap variabel-variabel yang menjadi tolak ukur pengelolaan keuangan daerah meliputi Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan dengan melakukan studi kajian pada Pemerintah kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab-akibat, salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Penelitian asosiatif menggunakan teknik analisis kuantitatif atau statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara lima variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini merupakan pejabat/aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada seluruh Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat. Sementara sampel adalah 2 Pejabat/aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan untuk sampel ditetapkan oleh peneliti adalah seluruh anggota populasi yaitu Pejabat/aparatur yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Sampel penelitian ini adalah 2 diantara Pejabat/Aparatur Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pejabat Penatausahaan Keuangan yang terdiri sebanyak 98 orang (Kabupaten Dairi sebanyak 52 orang dan Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 46 orang) sebagai sampel dalam penelitian ini.

Sumber data penelitian ini merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer. Untuk mendapatkan data dari responden digunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang diberikan langsung maupun melalui online oleh penulis kepada responden sebanyak 98 kuesioner, dan responden diberi waktu untuk menjawab pertanyaan kuesioner hingga 7 (tujuh) hari setelah kuesioner diberikan. Menurut Sugiyono (2019), teknik analisis data adalah teknik untuk melakukan pengujian hipotesis penelitian yang disesuaikan dengan metode statistik yang disediakan agar pertanyaan penelitian dapat terjawab. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis statistik deskriptif, analisis statistik PLS-SEM. Skala pengukuran variabel pada penelitian menggunakan skala likert. Skala likert adalah penentuan tingkat dan pengelompokan berdasarkan kategori tertentu, sekaligus mengukur besarnya perbedaan persepsi seseorang (Sekaran, 2011). Responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan fakta yang dialami. Jawaban setiap pertanyaan dapat dipilih sesuai dengan skala nilai pengukuran 5 poin yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Kurang setuju, (2) setuju dan (1) sangat setuju, seperti yang terlihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1 Skala Pengukuran Variabel

Pilihan Jawaban Responden	Skala Pengukuran (Poin)
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa kuesioner yang diajukan kepada yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yaitu pejabat/aparatur yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. Terdapat 26 Organisasi perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Dairi dan 23 Organisasi perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara sehingga total Organisasi perangkat Daerah (OPD) berjumlah 49 Organisasi perangkat Daerah (OPD) maka diperoleh sampel sebanyak 98 (49 x 2), Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini 98 pejabat/aparatur.

Kuesioner penelitian berisi 51 pernyataan mengenai Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi, Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pernyataan dalam kuesioner penelitian sudah digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu, yang mana keabsahan dan kesahihannya telah terbukti memadai, sehingga 51 pernyataan tersebut dinyatakan memenuhi kriteria untuk disebar kepada responden. Kuesioner mulai disebar pada tanggal 10 November hingga 28 November 2022.

Tabel 2 Dekripsi Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	98	100 %
Kuesioner yang kembali	94	95,92 %
Kuesioner yang tidak kembali	4	4,08 %
Kuesioner yang digunakan	94	95,92 %

Sumber : data primer diolah, 2021

Sampel penelitian ini adalah 2 diantara Pejabat/Aparatur yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 98 kuesioner yang disebar, sebanyak 94 kuesioner yang kembali. Dengan demikian, jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 94 kuesioner atau dengan kata lain terdapat 94 pejabat/aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat yang bersedia mengisi kuesioner penelitian. Dari total keseluruhan kuesioner yang disebar maka, persentase kuesioner yang digunakan dalam penelitian sebesar 95,92 %.

Statistik Deskripsi Responden

Karakteristik responden digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai data demografi responden (jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir) Berikut ini disajikan secara lebih rinci statistik demografi responden:

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	58	61,70 %
Perempuan	36	38,30 %

Sumber : data primer diolah, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa pejabat/aparatur di kabupaten Dairi dan kabupaten Pakpak Bharat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah paling banyak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang (61,70 %) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (38,30 %).

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
21 – 30 tahun	2	2%
31 – 40 tahun	23	24%
41 – 50 tahun	44	47%
>50 tahun	25	27%

Sumber : data primer diolah, 2022

Tabel 4 menunjukkan bahwa data umur pejabat/aparatur di kabupaten Dairi dan kabupaten Pakpak Bharat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang berhasil terkumpul dikelompokkan kedalam 4 kelompok umur yaitu yang paling banyak pejabat/aparatur pengelolaan keuangan daerah yang berumur 41-50 tahun sebanyak 44 orang (47%), yang >50 sebanyak 25 orang (27%), yang berumur 31-40 tahun sebanyak 23 orang (24%), dan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang (8%).

Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
D3	3	3%
S1	59	63 %
S2	31	33 %
S3	1	1%

Sumber : data primer diolah, 2022

Tabel 5 menunjukkan bahwa pejabat/aparatur kabupaten Dairi dan kabupaten Pakpak Bharat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 59 orang (63%), S2 sebanyak 31 orang (33%), D3 sebanyak 3 orang (3%), dan S3 sebanyak 1 orang (1).

Analisis Statistik Deskriptif Jawaban Pernyataan Kuesioner

Penyebaran kuesioner yang menghasilkan 94 jawaban responden dari setiap pernyataan kuesioner telah dilakukan uji deskriptif yang dilakukan pada 5 variabel X dan 1 Variabel Y.

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Dan Persentase Berdasarkan Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah (X1)

P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	0	0	10	10.64	7	7.45	24	25.53	53	56.38	94	100	4.28
X1.2	3	3.19	10	10.64	11	11.7	37	39.36	33	35.11	94	100	3.93
X1.3	0	0	10	10.64	9	9.57	37	39.36	38	40.43	94	100	4.10
X1.4	0	0	11	11.7	10	10.64	40	42.55	33	35.11	94	100	4.01
X1.5	0	0	11	11.7	7	7.45	44	46.81	32	34.04	94	100	4.03
X1.6	0	0	8	8.51	10	10.64	32	34.04	44	46.81	94	100	4.19
X1.7	0	0	10	10.64	10	10.64	53	56.38	21	22.34	94	100	3.90
X1.8	0	0	11	11.7	7	7.45	37	39.36	39	41.49	94	100	4.11

Pada tabel 6 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk variabel akuntabilitas keuangan daerah. Dari 8 pernyataan kuesioner menunjukkan bahwa jumlah responden tidak setuju tentang Pemerintah Daerah telah melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang merupakan bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan semua unsur-unsur masyarakat (X1.1) terdapat 10 (10.64%), sementara jumlah responden yang menilai kurang setuju sebanyak 7 (7.45%), responden menjawab Setuju sebanyak 24 (25.53%) dan responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 53 (56.38%).

Jumlah responden yang menilai sangat tidak setuju tentang Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (X1.2) sebanyak 3 (3.19%), responden menjawab Tidak Setuju sebanyak 10 (10.64%), responden menjawab Kurang setuju sebanyak 11 (11.70%), sementara responden menjawab Setuju sebanyak 37 (39.36%) dan responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 33 (35.11%). Jumlah responden yang menilai sangat tidak setuju tentang Pemerintah Daerah telah mampu menjelaskan, menjawab dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada publik melalui Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD selambat - lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun anggaran (X1.3) terdapat sebanyak 10 (10.64%), responden menjawab Kurang Setuju sebanyak 9 (9.57%), sementara responden menjawab Setuju sebanyak 37 (39.36%) dan responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 38 (40.43%).

Jumlah responden yang menilai sangat tidak setuju tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas - luasnya bagi masyarakat untuk menilai Kinerja Pemerintah Daerah dan menerima saran masyarakat untuk kinerja pemerintah selanjutnya (X1.4) terdapat sebanyak 11 (11.70%), responden menjawab Kurang Setuju sebanyak 10 (10.64%), sementara responden menjawab Setuju sebanyak 40 (42.55%) dan responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 33 (35.11%). Jumlah responden yang menilai sangat tidak setuju tentang Indikator hasil kinerja yang akan dicapai di tetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1.5) terdapat sebanyak 11 (11.70%), responden menjawab Kurang Setuju sebanyak 7 (7.45%), sementara responden menjawab Setuju sebanyak 44 (46.81%) dan responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 32 (34.04%).

Jumlah responden yang menilai sangat tidak setuju tentang terdapat Proses dan pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah diawasi secara terus menerus oleh pengawas intern maupun ekstern (X1.6) sebanyak 8 (8.51%), responden menjawab Kurang Setuju sebanyak 10 (10.64%), sementara responden menjawab Setuju sebanyak 32 (34.04%) dan responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 44 (46.81%). Jumlah responden yang menilai sangat tidak setuju tentang Dalam Hal Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah memperhitungkan *Cost and Benefit Analysis* yang tidak terbatas dari segi ekonomi tetapi juga sosial dan sebagainya (X1.7) terdapat sebanyak 10 (10.64%), responden menjawab Kurang Setuju sebanyak 10 (10.64%), sementara responden menjawab Setuju sebanyak 53 (56.38%) dan responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 21 (22.34%). Jumlah responden yang menilai sangat tidak setuju tentang Pemerintah Daerah telah memiliki prosedur hukum dan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan dalam Pembuatan keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik (X1.8) terdapat sebanyak 11 (11.70%), responden menjawab Kurang Setuju sebanyak 7 (7.45%), sementara responden menjawab Setuju sebanyak 37 (39.36%) dan responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 39 (41.49%).

Tabel 7 Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Variabel Value For Money (X2)

P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	0	0	12	12.77	9	9.57	45	47.87	28	29.79	94	100	3.95
X2.2	0	0	12	12.77	11	11.7	48	51.06	23	24.47	94	100	3.87
X2.3	0	0	11	11.7	10	10.64	53	56.38	20	21.28	94	100	3.87
X2.4	1	1.06	10	10.64	10	10.64	48	51.06	25	26.6	94	100	3.91
X2.5	0	0	11	11.7	12	12.77	51	54.26	20	21.28	94	100	3.85
X2.6	0	0	11	11.7	17	18.09	46	48.94	20	21.28	94	100	3.80
X2.7	0	0	10	10.64	12	12.77	48	51.06	24	25.53	94	100	3.91
X2.8	0	0	11	11.7	14	14.89	47	50	22	23.4	94	100	3.85

Pada tabel 7 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk variabel *Value For Money*. Dari 8 pernyataan kuesioner menunjukkan bahwa jumlah responden tidak setuju tentang Pemerintah Daerah telah menerapkan Prinsip Ekonomi sebagai suatu cara untuk memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah atau dengan kata lain menghindari pemborosan dan yang tidak produktif (X2.1) terdapat 12 (12.77%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 9 (9.57%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 45 (47.87%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 28 (29.79%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pemerintah Daerah dianggap telah mampu menghilangkan atau mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dalam suatu kegiatan operasional pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (X2.2) terdapat 12 (12.77%), responden menjawab Kurang Setuju sebanyak 11 (11.70%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 48 (51.06%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 23 (24.47%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pemerintah Daerah telah mampu mencapai produktivitas kerja yang baik dalam setiap kegiatan pencapaian program dengan target yang telah ditetapkan. (Prinsip Efisiensi) (X2.3) terdapat 11 (11.70%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 10 (10.64%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 53 (56.38%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 (21.28%).

Jumlah responden yang menilai sangat sangat tidak setuju tentang Efisiensi Keuangan Daerah dimaksudkan adalah Pemerintah mampu melakukan Penggunaan dana masyarakat dengan berdaya guna maksimal. (atau Perbandingan *Output/input* yang dikaitkan dengan standar kerja atau target yang telah ditetapkan (X2.4) terdapat 1 (1.06%), responden menjawab tidak setuju dan kurang setuju sebanyak 10 (10.64%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 48 (51.06%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 25 (26.60%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pemerintah Daerah selalu efektif dalam penggunaan keuangan dimana Pemerintah Daerah selalu mencapai hasil program kerja yang maksimal atas target yang telah ditetapkan (X2.5) terdapat 11 (11.70%), responden menjawab Kurang Setuju sebanyak 12 (12.77%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 51 (54.26%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 (21.28%).

Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pencapaian kegiatan dari sebuah program pemerintah diyakini telah dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat (X2.6) terdapat 11 (11.70%), responden menjawab Kurang Setuju sebanyak 17 (18.09%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 46 (48.94%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 (21.28%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pemerintah Daerah telah memberikan pelayanan publik secara adil (*equity*) dan Merata (*equality*) bagi seluruh masyarakat yang memiliki kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama, baik dari sisi pelayanan pembangunan yang proporsional maupun dari sisi sosial dan jasa (X2.7) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 12 (12.77%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 48 (51.06%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 24 (25.53%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Penggunaan uang publik telah dilakukan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja melainkan secara merata (X2.8) terdapat 11 (11.70%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 14 (14.89%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 47 (50.00%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 22 (23.40%).

Tabel 8 Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Variabel Kejujuran (X3)

P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X3.1	0	0	11	11.7	9	9.57	46	48.94	28	29.79	94	100	3.97
X3.2	0	0	11	11.7	11	11.7	49	52.13	23	24.47	94	100	3.89
X3.3	0	0	12	12.77	17	18.09	44	46.81	21	22.34	94	100	3.79
X3.4	0	0	9	9.57	15	15.96	46	48.94	24	25.53	94	100	3.90
X3.5	0	0	10	10.64	12	12.77	38	40.43	34	36.17	94	100	4.02
X3.6	0	0	10	10.64	11	11.7	44	46.81	29	30.85	94	100	3.98
X3.7	0	0	11	11.7	8	8.51	36	38.3	39	41.49	94	100	4.10
X3.8	0	0	10	10.64	11	11.7	48	51.06	25	26.6	94	100	3.94

Pada tabel 8 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk variabel kejujuran. Dari 8 pernyataan kuesioner menunjukkan bahwa jumlah responden tidak setuju tentang *Fairness* atau kejujuran yang merupakan bagian dari tujuan “*good governance*” merupakan hal wajib dan sedang digalakkan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah sedang melaksanakannya (X3.1) terdapat 11 (11.70%), responden

menjawab kurang setuju sebanyak 9 (9.57%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 46 (48.94%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 28 (29.79%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pemerintah Daerah selama ini telah dengan tegas melaksanakan akuntabilitas kejujuran (*Accountability for probit*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) dan telah memberikan *finishment* kepada PPKD yang melanggarnya (X3.2) terdapat 11 (11.70%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 11 (11.70%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 49 (52.13%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 23 (24.47%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Dalam pemberian “Kontrak Tender“ selama ini Pemerintah Daerah telah melaksanakan proses tender secara *fair* (jujur) (X3.3) terdapat 12 (12.77%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 17 (18.09%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 44 (46.81%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 21 (22.34%).

Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang SKPD selaku pengguna anggaran telah bekerja dengan jujur, ikhlas dan penuh tanggungjawab dan tidak pernah me - *mark up* anggaran (X3.4) terdapat 9 (9.57%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 15 (15.96%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 46 (48.94%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 24 (25.53%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Jika di kantor tempat saya bekerja ada bagi- bagi uang yang bukan semestinya hak saya, maka saya menolak dengan tegas, dan saya yakin uang itu adalah hak rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat (X3.5) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 12 (12.77%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 38 (40.43%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 34 (36.17%).

Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pemerintah Daerah selama ini telah menyajikan (*disclosure*) Laporan Keuangan Daerah dengan keadaan yang sebenarnya tanpa menutupi hal - hal yang dianggap menyimpang dalam penggunaan anggaran (X3.6) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 11 (11.70%), responden menjawab setuju sebanyak 44 (46.81%) dan sementara responden menjawab sangat setuju sebanyak 29 (30.85%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Bila saya mengetahui atasan saya melakukan penyelewengan penggunaan dana lembaga/instansi maka saya akan mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar sesuai SOP yang berlaku (X3.7) terdapat 11 (11.70%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 8 (8.51%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 36 (38.30%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 39 (41.49%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Selama ini Pemerintah Daerah telah melaksanakan penggunaan APBD dengan baik dan benar sesuai rencana kerja tahunan (RKT) yang telah ditentukan (X3.8) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 11 (11.70%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 48 (51.06%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 25 (26.60%).

Tabel 9 Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Variabel Transparansi (X4)

P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X4.1	1	1.06	10	10.64	10	10.64	45	47.87	28	29.79	94	100	3.95
X4.2	0	0	11	11.7	9	9.57	47	50	27	28.72	94	100	3.96
X4.3	0	0	12	12.77	8	8.51	50	53.19	24	25.53	94	100	3.91
X4.4	0	0	10	10.64	13	13.83	47	50	24	25.53	94	100	3.90
X4.5	0	0	10	10.64	15	15.96	48	51.06	21	22.34	94	100	3.85
X4.6	0	0	11	11.7	13	13.83	43	45.74	27	28.72	94	100	3.91
X4.7	1	1.06	11	11.7	8	8.51	42	44.68	32	34.04	94	100	3.99
X4.8	0	0	10	10.64	13	13.83	41	43.62	30	31.91	94	100	3.97
X4.9	0	0	10	10.64	10	10.64	51	54.26	23	24.47	94	100	3.93
X4.10	0	0	11	11.7	9	9.57	49	52.13	25	26.6	94	100	3.94

Pada tabel 9 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk variabel Transparansi. Dari 10 pernyataan kuesioner menunjukkan bahwa jumlah responden sangat tidak setuju tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilakukan secara transparan (Keterbukaan), baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan (X4.1) terdapat 1 (1.06%), responden menjawab tidak setuju tentang sebanyak 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 10 (10.64%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 45 (47.87%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 28 (29.79%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pengumuman Keuangan Daerah baik Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban maupun

Pengawasan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (X4.2) terdapat 11 (11.70%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 9 (9.57%), responden menjawab setuju sebanyak 47 (50.00%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 27 (28.72%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Informasi tentang Keuangan Daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya (X4.3) terdapat 12 (12.77%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 8 (8.51%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 50 (53.19%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 24 (25.53%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersikap “Welcome dan Open Menegement” terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Keuangan Daerah (X4.4) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 13 (13.83%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 47 (50.00%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 24 (25.53%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Akses untuk memperoleh informasi keuangan daerah tidak berbelit - belit dan tidak birokratis (X4.5) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 15 (15.96%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 48 (51.06%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 21 (22.34%).

Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah telah dilakukan dengan tepat waktu (X4.6) terdapat 11 (11.70%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 13 (13.83%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 43 (45.74%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 27 (28.72%). Jumlah responden yang menilai sangat tidak setuju tentang Musrenbang yang diikuti oleh unsur masyarakat dan unsur Muspida, dapat meningkatkan kebijakan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X4.7) terdapat 1 (1.06%), responden menjawab tidak setuju sebanyak 11 (11.70%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 8 (8.51%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 42 (44.68%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 32 (34.04%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Laporan pertanggung jawaban tahunan selalu dilakukan tepat waktu (X4.8) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 13 (13.83%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 41 (43.62%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 30 (31.91%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Transparansi telah dilakukan sebagai cerminan terlaksananya “Horizontal Accountability” antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (X4.9) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 10 (10.64%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 51 (54.26%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 23 (24.47%).

Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pemerintah Daerah sepenuhnya telah menyadari akan kewajibannya untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, menyeluruh dan jujur kepada masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah dan pengelola sumberdaya yang dipercayakan kepadanya (fungsi Pemerintah Daerah sebagai Agent) (X4.10) terdapat 11 (11.70%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 9 (9.57%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 49 (52.13%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 25 (26.60%).

Tabel 10 Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Variabel Pengawasan (X5)

P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X5.1	0	0	11	11.7	11	11.7	48	51.06	24	25.53	94	100	3.9
X5.2	0	0	10	10.64	13	13.83	45	47.87	26	27.66	94	100	3.93
X5.3	0	0	8	8.51	8	8.51	41	43.62	37	39.36	94	100	4.14
X5.4	0	0	11	11.7	11	11.7	40	42.55	32	34.04	94	100	3.99
X5.5	0	0	10	10.64	11	11.7	45	47.87	28	29.79	94	100	3.97
X5.6	0	0	10	10.64	11	11.7	45	47.87	28	29.79	94	100	3.97
X5.7	0	0	10	10.64	8	8.51	49	52.13	27	28.72	94	100	3.99
X5.8	0	0	11	11.7	16	17.02	43	45.74	24	25.53	94	100	3.85
X5.9	0	0	11	11.7	12	12.77	48	51.06	23	24.47	94	100	3.88

Pada tabel 10 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk variabel Pengawasan. Dari 9 pernyataan kuesioner menunjukkan bahwa jumlah responden tidak setuju dan kurang setuju tentang Pemerintah Daerah telah melakukan Pengelolaan atau optimalisasi seluruh sumber daya yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan, dan atau penghematan yang mungkin dilakukan (X5.1) terdapat 11 (11.70%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 48 (51.06%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 24 (25.53%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Untuk meminimalisir kebocoran keuangan daerah, Pemerintah Daerah telah memperbaiki metode pengelolaan, metode pembukuan, dan metode pengawasan keuangan daerah itu Sendiri (X5.2) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 13 (13.83%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 45 (47.87%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 26 (27.66%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju dan kurang setuju tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilakukan oleh Itwilkot (inspektorat wilayah kota) sebagai Pengawas Intern Pemerintah dan BPK sebagai Pengawas Extern Pemerintah (X5.3) terdapat 8 (8.51%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 41 (43.62%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 37 (39.36%).

Jumlah responden yang menilai tidak setuju dan kurang setuju tentang Berdasarkan Metode Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan Pengawasan Keuangan Daerah dengan Pengawasan atasan langsung Pengawasan Fungsional (pengawasan oleh aparatur/unit organisasi yang dibentuk untuk pengawasan) dan Pengawasan melekat (WASKAT) (X5.4) terdapat 11 (11.70%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 40 (42.55%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 32 (34.04%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pengawasan dan Pengendalian dimaksudkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat (X5.5) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 11 (11.70%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 45 (47.87%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 28 (29.79%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Anggaran Sektor Publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif dan Pengendalian didasari prinsip - prinsip ekonomis, efektif dan efisien (X5.6) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 11 (11.70%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 45 (47.87%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 28 (29.79%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Audit Intern telah melakukan audit operasional, audit manajemen dan audit kinerja (X5.7) terdapat 10 (10.64%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 8 (8.51%) sementara responden menjawab setuju sebanyak 49 (52.13%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 27 (28.72%).

Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah secara aktif megawasi Pengelolaan Keuangan Daerah, atau yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD (X5.8) terdapat 11 (11.70%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 16 (17.02%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 43 (45.74%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 24 (25.53%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Dalam Hal Eksekutif atau jajarannya telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang merugikan keuangan daerah, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan, dan dilaporkan kepada BPK paling lama 7 hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui (X5.9) terdapat 11 (11.70%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 12 (12.77%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 48 (51.06%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 23 (24.47%).

Tabel 11 Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y1.1	0	0	5	5.32	11	11.7	44	46.81	34	36.17	94	100	4.14
Y1.2	0	0	5	5.32	9	9.57	51	54.26	29	30.85	94	100	4.11
Y1.3	1	1.06	8	8.51	13	13.83	44	46.81	28	29.79	94	100	3.96
Y1.4	1	1.06	7	7.45	9	9.57	36	38.3	41	43.62	94	100	4.16
Y1.5	0	0	6	6.38	10	10.64	42	44.68	36	38.3	94	100	4.15
Y1.6	0	0	6	6.38	8	8.51	50	53.19	30	31.91	94	100	4.11
Y1.7	0	0	7	7.45	10	10.64	45	47.87	32	34.04	94	100	4.09
Y1.8	0	0	7	7.45	10	10.64	42	44.68	35	37.23	94	100	4.12

Pada tabel 11 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk variabel Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari 8 pernyataan kuesioner menunjukkan bahwa jumlah responden tidak setuju tentang Dalam Fungsinya Pemerintah Daerah sebagai *Agent*, telah dapat melakukan seluruh kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, dengan baik dan benar dan memuaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Y1.1) terdapat 5 (5.32%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 11 (11.70%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 44 (46.81%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 34 (36.17%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pemerintah Daerah sebagai pemegang amanah (agent) telah mampu memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan Melaporkan segala aktifitas kegiatan pengelolaan keuangan daerah kepada pihak pemberi amanat (rakyat) dengan baik dan benar, sehingga terwujudlah pemerintahan yang akuntabel (Y1.2) terdapat 5 (5.32%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 9 (9.57%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 51 (54.26%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 29 (30.85%). Jumlah responden yang menilai sangat tidak setuju tentang Pemerintah Daerah telah mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomi, efisien dan efektif, juga adil dan merata (Y1.3) terdapat 1 (1.06%), responden menjawab tidak setuju sebanyak 8 (8.51%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 13 (13.83%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 44 (46.81%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 28 (29.79%).

Jumlah responden yang menilai sangat tidak setuju tentang Kejujuran adalah modal utama yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat rakyat untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Y1.4), terdapat 1 (1.06%), responden menjawab tidak setuju sebanyak 7 (7.45%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 9 (9.57%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 36 (38.30%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 41 (43.62%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Keterbukaan (Transparansi) dalam pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang sangat didambakan oleh masyarakat dan hal tersebut telah mampu diwujudkan oleh Pemerintah Daerah (Y1.5) terdapat 6 (6.38%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 10 (10.64%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 42 (44.68%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 36 (38.30%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh atasan langsung, fungsional (Lembaga Pengawas Intern Pemerintah maupun Lembaga Pengawas ekstern Pemerintah) dan Waskat (Y1.6), terdapat 6 (6.38%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 8 (8.51%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 50 (53.19%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 30 (31.91%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pelaksanaan Good Governance yang mengarah pada transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responsibility telah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Y1.7) terdapat 7 (7.45%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 10 (10.64%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 45 (47.87%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 32 (34.04%). Jumlah responden yang menilai tidak setuju tentang Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif (Y1.8) terdapat 7 (7.45%), responden menjawab kurang setuju sebanyak 10 (10.64%), sementara responden menjawab setuju sebanyak 42 (44.68%) dan responden menjawab sangat setuju sebanyak 35 (37.23%).

Analisis Statistik PLS-SEM

(Menurut Ghozali, 2008). “Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis *Partial Least Square* (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai”. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Evaluasi Model Pengukuran/ *Measurement model* (Outer Model)

Validitas konvergen merupakan bagian dari measurement model (model pengukuran) yang dalam SEM-PLS biasanya disebut sebagai *outer model* sedangkan dalam *covariance-based* SEM disebut *confirmatory factor analysis* (CFA) (Sholihin, M., & Ratmono, D. 2021). Terdapat dua kriteria untuk menilai apakah *outer model* (model pengukuran) memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif, yaitu loading harus di atas 0,7 dan nilai p signifikan ($<0,05$) (Sholihin, M., & Ratmono, D. 2021). Namun dalam beberapa kasus, sering syarat loading di atas 0,7 sering tidak terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, *loading* antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan (Sholihin, M., & Ratmono, D. 2021).

Indikator dengan *loading* di bawah 0,40 harus dihapus dari model. Namun untuk indikator dengan *loading* antara 0,40 dan 0,70 sebaiknya kita analisis dampak dari keputusan menghapus indikator tersebut pada *average variance extracted* (AVE) dan *composite reliability*. Kita dapat menghapus indikator dengan *loading* antara 0,40 dan 0,70 jika indikator tersebut dapat meningkatkan *average variance extracted* (AVE) dan *composite reliability* di atas batasannya (*threshold*) (Sholihin, M., & Ratmono, D. 2021). Nilai batasan AVE adalah 0,50 dan *composite reliability* sebesar 0,7. Pertimbangan lain dalam menghapus indikator adalah dampaknya pada validitas isi (*content validity*) konstruk. Indikator dengan *loading* yang kecil kadang tetap dipertahankan karena punya kontribusi pada validitas isi konstruk (Sholihin, M., & Ratmono, D. 2021). Tabel 5.11 disajikan nilai-nilai *loading* untuk tiap-tiap indikator.

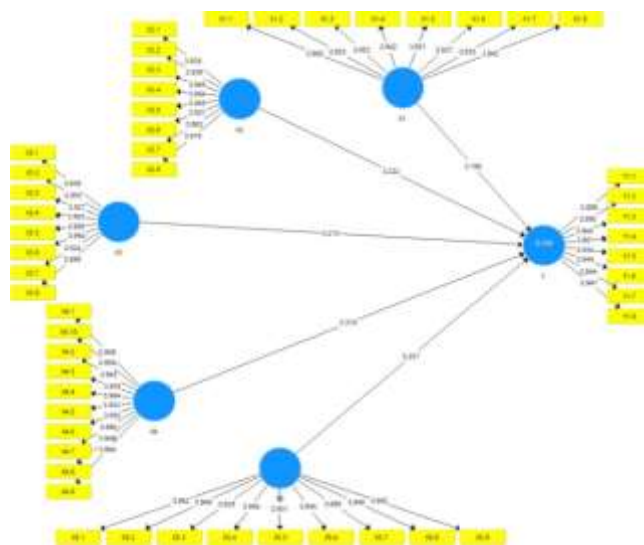
Tabel 12 Pengujian Validitas berdasarkan Loading Faktor

Variable	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan Daerah (X1)	X1.1	0.900	Valid
	X1.2	0.803	Valid
	X1.3	0.953	Valid
	X1.4	0.942	Valid
	X1.5	0.951	Valid
	X1.6	0.927	Valid
	X1.7	0.935	Valid
	X1.8	0.943	Valid
Value For Money (X2)	X2.1	0.929	Valid
	X2.2	0.939	Valid
	X2.3	0.949	Valid
	X2.4	0.864	Valid
	X2.5	0.949	Valid
	X2.6	0.931	Valid
	X2.7	0.902	Valid
	X2.8	0.919	Valid
Kejujuran (X3)	X3.1	0.939	Valid
	X3.2	0.955	Valid
	X3.3	0.927	Valid
	X3.4	0.903	Valid
	X3.5	0.908	Valid
	X3.6	0.964	Valid
	X3.7	0.924	Valid
	X3.8	0.889	Valid
Transparansi (X4)	X4.1	0.908	Valid
	X4.2	0.945	Valid
	X4.3	0.934	Valid
	X4.4	0.964	Valid
	X4.5	0.922	Valid
	X4.6	0.950	Valid
	X4.7	0.890	Valid
	X4.8	0.949	Valid
Pengawasan (X5)	X4.9	0.964	Valid
	X4.10	0.958	Valid
	X5.1	0.962	Valid
	X5.2	0.949	Valid
	X5.3	0.829	Valid
	X5.4	0.956	Valid
	X5.5	0.931	Valid
	X5.6	0.945	Valid
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y1)	X5.7	0.899	Valid
	X5.8	0.946	Valid
	X5.9	0.950	Valid
	Y1.1	0.888	Valid
	Y1.2	0.890	Valid
	Y1.3	0.844	Valid
	Y1.4	0.861	Valid
	Y1.5	0.934	Valid
Y1.6	0.944	Valid	
	Y1.7	0.844	Valid
	Y1.8	0.947	Valid

Sumber : Output SmartPLS

Berdasarkan tabel 12 diatas dapat diketahui indikator-indikator yang paling dominan dalam memberikan kontribusi terhadap konstruk latennya masing-masing, sebagai berikut:

1. Indikator yang paling baik dalam membentuk variabel akuntabilitas keuangan daerah (X1) adalah X1.3 dengan *loading factor* tertinggi sebesar 0.953, sehingga apabila pemerintah ingin meningkatkan akuntabilitas daerah yang tinggi maka rekomendasi secara statistik adalah mampu menjelaskan, menjawab dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada publik melalui Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD selambat - lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun anggaran.
2. Indikator yang paling baik dalam membentuk variabel *Value For Money* (X2) adalah X2.3 dan X2.5 dengan *loading factor* tertinggi sebesar 0.949, sehingga apabila pemerintah ingin meningkatkan *Value For Money* yang tinggi maka rekomendasi secara statistik adalah mampu mencapai produktivitas kerja yang baik dalam setiap kegiatan pencapaian program dengan target yang telah ditetapkan. (Prinsip Effisiensi) dan selalu efektif dalam penggunaan keuangan dimana Pemerintah Daerah selalu mencapai hasil program kerja yang maksimal atas target yang telah ditetapkan.
3. Indikator yang paling baik dalam membentuk variabel Kejujuran (X3) adalah X3.6 dengan *loading factor* tertinggi sebesar 0.964 sehingga apabila pemerintah ingin meningkatkan kejujuran yang tinggi maka rekomendasi secara statistik adalah menyajikan (*disclosure*) Laporan Keuangan Daerah dengan keadaan yang sebenarnya tanpa menutupi hal - hal yang dianggap menyimpang dalam penggunaan anggaran.
4. Indikator yang paling baik dalam membentuk variabel transparansi (X4) adalah X4.4 dan X4.9 dengan *loading factor* tertinggi sebesar 0.964 sehingga apabila pemerintah ingin meningkatkan transparansi yang tinggi maka rekomendasi secara statistik adalah bersikap “*Welcome dan Open Menegement*” terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Keuangan Daerah dan dilakukan sebagai cerminan terlaksananya “*Horizontal Accountability*” antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Indikator yang paling baik dalam membentuk variabel pengawasan (X4) adalah X5.1 dengan *loading factor* tertinggi sebesar 0.962 sehingga apabila pemerintah ingin meningkatkan pengawasan yang tinggi maka rekomendasi secara statistik adalah melakukan Pengelolaan atau optimalisasi seluruh sumber daya yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan, dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
6. Indikator yang paling baik dalam membentuk variabel pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah Y1.8 dengan *loading factor* tertinggi sebesar 0.947 sehingga apabila pemerintah ingin meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang baik maka rekomendasi secara statistik adalah dilakukan secara terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif.



Gambar 1 Pengujian Validitas berdasarkan *Loading Faktor*

Dari Gambar 1 diatas dapat diketahui bahwa seluruh nilai *Loading factor* dalam variabel telah lebih besar dari 0,7 yang berarti indikator dinyatakan *valid* sehingga telah layak digunakan dalam penelitian ini.

Nilai Avarage Variance Exctracted (AVE)

Selain nilai *loading factor*, untuk memenuhi validitas konvergen perlu diketahui nilai *Avarage Variance Exctracted* (AVE). Nilai AVE disajikan pada tabel 5.12 berikut yang diperoleh dari *output PLS Algorithm*.

Tabel 13 Nilai Avarage Variance Extract (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	keterangan
Akuntabilitas Keuangan Daerah	0.847	<i>valid</i>
<i>Value For Money</i>	0.852	<i>valid</i>
Kejujuran	0.858	<i>valid</i>
Transparansi	0.881	<i>valid</i>
Pengawasan	0.866	<i>valid</i>
Pengelolaan Keuangan Daerah	0.801	<i>valid</i>

Sumber : Output SmartPLS, 2022

Ketentuan mengenai parameter pengukuran (*rule of thumb*) model pengukuran (*outer model*) bahwa AVE dianggap telah memenuhi validitas konvergen jika nilai AVE lebih besar dari 0,50 (Mahfud & Ratmono, 2013). Maka berdasarkan tabel nilai AVE di atas, dapat diketahui bahwa nilai AVE masing-masing konstruk telah valid. Sehingga konstruk telah memenuhi validitas konvergen.

Hasil Uji Reliabilitas

Selain uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk dan *cronbach alpha*. *Composite reliability* (CR) merupakan pengukuran yang disarankan karena dianggap lebih tepat untuk mengukur model reflektif. Untuk melihat variabel dikatakan reliabel atau tidak dapat dilihat melalui CR yang dianggap lebih akurat dan bahkan direkomendasikan karena diukur dengan melihat indikator bobot diferensialnya dibandingkan *Cronbach's Alpha*. Besarnya nilainya yang ditetapkan dan disarankan > 0.70 sehingga reliabilitas dapat dikatakan baik (Hair et al., 2017). Nilai *composite reliability* dari hasil *PLS Algorithm* program *SEM PLS* dapat dilihat pada tabel 14 berikut.

Tabel 14 Nilai Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan Daerah	0.978	<i>Reliabel</i>
<i>Value For Money</i>	0.979	<i>Reliabel</i>
Kejujuran	0.980	<i>Reliabel</i>
Transparansi	0.987	<i>Reliabel</i>
Pengawasan	0.983	<i>Reliabel</i>
Pengelolaan Keuangan Daerah	0.970	<i>Reliabel</i>

Sumber : Output SmartPLS, 2022

Berdasarkan tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* masing-masing konstruk berada di atas 0.70, sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi reliabilitas yang baik (*reliabel*).

Nilai Cronbach's Alpha

Tabel 15 Nilai Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	keterangan
Akuntabilitas Keuangan Daerah	0.974	<i>Reliabel</i>
<i>Value For Money</i>	0.975	<i>Reliabel</i>
Kejujuran	0.976	<i>Reliabel</i>
Transparansi	0.985	<i>Reliabel</i>
Pengawasan	0.980	<i>Reliabel</i>
Pengelolaan Keuangan Daerah	0.964	<i>Reliabel</i>

Sumber : Output SEM PLS, 2022

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* masing-masing konstruk berada di atas 0.70, sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi reliabilitas yang baik (*reliabel*).

Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria *outer model* dan telah didapatkan model yang ideal sesuai dengan kerangka konseptual penelitian, selanjutnya dilakukan pengujian model struktural (*inner model*). Menilai *inner model* adalah melihat hubungan antar konstruk laten, dengan melihat hasil estimasi koefisien parameter *path* dan tingkat signifikansinya (Ghozali, 2008). Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen dan nilai koefisien *path* untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai *T statistic setiap path*. Hasil dari PLS *R-Square* mempresentasikan jumlah *variance* dari konstruk yang dijelaskan oleh model. Berikut disajikan hasil penghitungan nilai *R-Squares* yang dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16 Nilai *R-Square*

Variabel	R Square
Pengelolaan keuangan daerah	0.704

Sumber : Output Smart PLS, 2022

Berikut disajikan hasil penghitungan nilai *R-Square* yang dapat dilihat pada tabel 5.15. menunjukkan nilai *R-square* pengaruh secara bersama-sama atau simultan sebesar 0.704. Hasil ini menunjukkan bahwa 70.4% variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas Keuangan (X1), *Value for Money* (X2), Kejujuran (X3), Transparansi (X4) dan Pengawasan (X5). Sementara sisanya 29.6% (100% - 70.4%) dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Dasar pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah nilai yang terdapat pada *output path coefficient*. Hasil *output* estimasi untuk pengujian model struktural dapat dilihat pada table 17 berikut ini :

Tabel 17 Nilai T-Statistik Dan P Values Pada Inner Model

Variabel	Original Sample	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Akuntabilitas Keuangan Daerah->Pengelolaan Keuangan Daerah	0.186	0.085	2.187	0.015
<i>Value For Money</i> ->Pengelolaan Keuangan Daerah	0.222	0.102	2.172	0.015
Kejujuran ->Pengelolaan Keuangan Daerah	0.215	0.108	1.980	0.024
Transparansi ->Pengelolaan Keuangan Daerah	0.310	0.114	2.708	0.004
Pengawasan ->Pengelolaan Keuangan Daerah	0.257	0.109	2.349	0.010

Sumber : Output Smart PLS, 2022

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Pengujian dengan *bootstrap* juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidak normalan data penelitian. Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis SEM PLS adalah sebagai berikut:

Pengujian hipotesis 1: Pengaruh Akuntabilitas keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat.

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah (X1) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Ini berarti bahwa secara parsial menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar (*Original Sample*) 0,186 dan angka signifikansi sebesar 0.015 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan nilai koefisien jalur bertanda positif maka H_1 diterima. Sehingga akuntabilitas keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengujian hipotesis 2: Pengaruh *Value for Money* terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat.

Pengaruh *Value For Money* (X2) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Ini berarti bahwa secara parsial menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar (*Original Sample*) 0,222 dan angka signifikansi sebesar 0,015 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan nilai koefisien jalur bertanda positif maka H_2 diterima. Sehingga *value for money* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengujian hipotesis 3: Pengaruh Tingkat kejujuran pegawai terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat

Pengaruh Kejujuran (X3) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Ini berarti bahwa secara parsial menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar (*Original Sample*) 0,215 dan angka signifikansi sebesar 0,024 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan nilai koefisien jalur bertanda positif maka H_3 diterima. Sehingga kejujuran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengujian hipotesis 4: Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat.

Pengaruh Transparansi (X4) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Ini berarti bahwa secara parsial menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar (*Original Sample*) 0,310 dan angka signifikansi sebesar 0,004 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan nilai koefisien jalur bertanda positif maka H_4 diterima. Sehingga transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengujian hipotesis 5: Pengaruh Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat

Pengaruh Pengawasan (X5) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Ini berarti bahwa secara parsial menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar (*Original Sample*) 0,257 dan angka signifikansi sebesar 0,010 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan nilai koefisien jalur bertanda positif maka H_5 diterima. Sehingga pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Akuntabilitas keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, pegawai yang bekerja di setiap OPD telah memberikan tanggapan bahwa akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan selama ini sudah tergolong akuntabel. Dalam Fungsinya Pemerintah Daerah sebagai *Agent*, telah dapat melakukan seluruh kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, dengan baik dan benar dan memuaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis data dimana pemerintah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat sudah melaksanakan bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan semua unsur-unsur masyarakat yaitu melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan). Pemerintah juga sudah memperhatikan kepentingan publik dan golongan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menilai kinerja Pemerintahan daerah dan menerima saran masyarakat untuk kinerja pemerintah selanjutnya. Dalam penelitian ini juga Pemerintah kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat juga telah mampu menjelaskan, menjawab dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional kepada publik melalui Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan telah diawasi secara terus menerus oleh pengawas intern maupun ekstern. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Natision, A., et al, 2022; Yassir dkk, 2022; Permata dkk, 2022; Saida Said & Mustari S, 2021; Afriza, 2021;

Octavio M, 2022; Siregar, 2011) memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh *Value for Money* terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui *Value For Money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, pegawai yang bekerja di setiap OPD telah memberikan tanggapan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah. Teori keagenan adalah sebuah teori yang mempunyai sudut pandang bahwa agent yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk melaksanakan tugas yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai prinsip *value for money* yaitu: ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan, serta efektivitas (berhasil guna) tercapainya tujuan dan sasaran

Berdasarkan hasil analisis data pemerintah kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat telah menerapkan prinsip ekonomi sebagai suatu cara untuk memperoleh hasil dengan kualitas dan kuantitas yang menghindari hal-hal yang tidak produktif dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga telah mampu mencapai produktivitas kerja yang baik dalam setiap kegiatan pencapaian program dengan target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat bahwa pemerintah diyakini belum sepenuhnya dirasakan setiap lapisan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afriza, 2021; Saida Said & Mustari, 2021; Hasugian dkk, 2021; Hulu dkk, 2020; Suparno, 2012) memberikan bukti empiris bahwa *Value for money* berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Tingkat kejujuran pegawai terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui Kejujuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, pegawai yang bekerja di setiap OPD telah memberikan tanggapan bahwa dalam melakukan kontrak kerja maupun dalam penggunaan jabatan pemerintah telah jujur terhadap pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi teori keagenan dapat terwujud dalam hubungan kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap mempertimbangkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return, maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan bisa optimal bila terdapat kejujuran, yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen secara adil (kewajaran) atas pelaksanaan kewajiban dengan pemberian insentif yang memuaskan dari prinsipal ke agen.

Berdasarkan hasil analisis data pemerintah kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, Pemerintah Daerah selama ini telah dengan tegas melaksanakan akuntabilitas kejujuran (*Accountability for probit*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) dan telah memberikan *finishment* kepada PPKD yang melanggarnya. Dan dalam pemberian “Kontrak Tender” selama ini Pemerintah Daerah telah melaksanakan proses tender secara *fair* (jujur). Hasil penelitian juga membuktikan pemerintah daerah telah melaksanakan penggunaan anggaran dengan baik dan benar sesuai rencana kerja yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suparno, 2012) memberikan bukti empiris bahwa kejujuran berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, pegawai yang bekerja di setiap OPD telah memberikan tanggapan bahwa dalam proses pelaporan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah telah transparan melalui media elektronik maupun media informasi lainnya. Teori legitimasi dapat melandasi pemerintah daerah untuk patuh terhadap aturan yang dimana tercermin dalam pengelolaan keuangan yang tersusun sesuai

standar dan akan memengaruhi pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan suatu pemerintah daerah yang memiliki transparan yang salah satu menjadi harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data pemerintah kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat telah transparan, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan, dan dalam memperoleh Informasi tentang Keuangan Daerah kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya. Kewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, menyeluruh dan jujur kepada masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Natisation, A., et al, 2022; Yassir dkk, 2022; Saida Said & Mustari, 2021; Hasugian dkk, 2021; Rotinsulu & Nurnajamuddin, 2021; Arif, 2021; Widajatun & Kristiastuti, 2020; Nur Maghfirah, 2020; Suryanto, 2019; Suparno, 2012) memberikan bukti empiris bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, pegawai yang bekerja di setiap OPD telah memberikan tanggapan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis data pemerintah kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat dalam metode Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan Pengawasan Keuangan Daerah dengan Pengawasan atasan langsung Pengawasan Fungsional (pengawasan oleh aparatur/unit organisasi yang dibentuk untuk pengawasan) dan Pengawasan melekat, Pengawasan dan Pengendalian dimaksudkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dan Untuk meminimalisir kebocoran keuangan daerah, Pemerintah Daerah telah memperbaiki metode pengelolaan, metode pembukuan, dan metode pengawasan keuangan daerah itu sendiri. Dan berdasarkan penelitian bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah secara aktif mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah, atau yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yassir dkk, 2022; Hasugian dkk, 2021; Afriza, 2021; Widajatun & Kristiastuti, 2020; Suparno, 2012) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui apakah Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi, Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Pakpak Bharat Sumatera Utara. Pengumpulan sampel dilakukan dengan menggunakan metode survei yang menghasilkan 94 responden yang valid digunakan. Dari 94 responden, responden menggunakan SmartPLS dengan hasil penelitian menyatakan bahwa keseluruhan item pengukuran pada pernyataan kuesioner telah dikonfirmasi valid dan reliabel, maka berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza, M. N. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money* Dan Pengawasan Terhadap Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020. *KINDAI*, 17(3), 438-445.
- Arif, M. (2021). *The determinants of public service and environmental performance of local governments in Indonesia (Doctoral dissertation, Murdoch University)*.

- Band, J. A. (2006). *Consumer adoption of the online desktop*, Tesis, University of Pretoria, Afrika Selatan.
- Ghozali Imam. (2008). *Structural Equation Modeling. Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)* , Edisi 2, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt M. (2017). PLS-SEM or CB-SEM: *Updated guidelines on which method to use*. *International Journal Multivariate Data Analysis*, 1(2), 107-123.
- Hassan, Z. A., Schattner, P., & Mazza, D. (2006). *Doing a pilot study: Why is it essential? Malaysian Family Physician*, 1(2-3), 70-73. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4453116/>.
- Hasugian, F. T., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat). *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI*, 6(2), 175-185.
- Hasiara, L. O., & Suamba, I. B. P. (2020). *Education: Honesty, Discipline, Patience, and Ethics as Media in Implementing Government Financial Accounting in Samarinda, Indonesia*. *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(1), 55-66.
- Hulu, S., Maksum, A., Kholis, A., Hulu, T. H. S., & Baene, C. (2020). *Analysis of Determinants Accountability for Regional Financial Management in the Regional Government of North Nias Regency*. *International Journal of*
- Iqbal, M. (2021, Juli 28). Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Bui Dalam Korupsi Bansos.
- Keputusan Presiden (Kepres) No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 1 ayat 6
- Natision, A., & Esien, E. B., Harjo, D., Agoestyowati, E., Lestari, P, A (2022). *The Effect of Public Accountability and Transparency on State Financial Management Mechanism: A Quantitative Method Analysis*. *Ilomata International Journal of Social Science*, 3(1), 415-434.
- Nur Maghfirah, R. (2020). *The Effect of Transparency and Utilization of Regional Financial Accounting Information Systems on Budget Management Accountability in Gowa Regional Government*.
- Octavio, M. F. R. (2022). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Di Tingkat Kabupaten/Kota Dan Provinsi)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permata, A. I., Thoyib, M. T. M., & Mubarak, M. H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Journal Scientific Of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 3(7), 963-970.
- Rotinsulu, C. N. M., & Nurnajamuddin, M. (2021). *The Effect Of Budget Participation, Transparency and Internal Control on Accountability and Regional Financial Performance Banggai District*. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*.
- Said, S. (2021). *The Influence of Transparency Accountability and Value For Money Concepts on Financial Management in the Public Sector*. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(3), 244-251.
- Sekaran, U. (2014). *Research Methods for Business*. Translated by Kwan Men Yon, Edisi Keempat. USA: John Wiley & Sons Inc.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis. Penerbit Andi.

- Siregar, Liper, 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 6.
- Sugiyono, (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- Suparno. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai). Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara.
- Suryanto, S. (2019). *Analysis of Regional Financial Information Systems As A Media of Regional Financial Management Transparency In Indonesia. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 662, No. 2, p. 022080). IOP Publishing.*
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). *The effect of regional financial supervision, accountability and transparency of regional financial management on local government performance. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(4), 2966-2974.*
- Yassir, Y., Mursalim, M., & Junaid, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. YUME: Journal of Management, 5(2), 477-494.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Trikonomika, 10(1), 152- 62